

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan dalam melakukan pendanaan salah satunya dengan cara menggunakan hutang. Hutang merupakan cara untuk memperoleh dana dari pihak kreditor. Dana yang diberikan dapat menimbulkan biaya hutang bagi perusahaan, dimana biaya hutang merupakan tingkat bunga yang diterima oleh kreditor sebagai tingkat pengembalian (Ashkhabi dan Agustina 2015). Biaya hutang merupakan informasi yang berperan dalam laporan keuangan perusahaan. Informasi yang diberikan oleh perusahaan secara sukarela dapat dilihat dari tingkat risiko yang dimiliki perusahaan tersebut (Yunita, 2012).

Salah satu perusahaan yang terlibat kasus biaya hutang adalah Grup Lippo. Dari tahun 2014 sampai tahun 2017 Grup Lippo mengalami tren penurunan misalnya yaitu Lippo Karawaci Tbk (LPKR) memiliki hutang terbesar di antara yang lainnya dengan nilai Rp 13,8 triliun. Sedangkan rasio hutang terhadap laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) sebesar 7,32 kali. Artinya, beban utang yang ditanggungnya 7,3 kali lebih besar dibandingkan perolehan profitnya. Rasio ini terus meningkat dalam empat tahun terakhir, yaitu pada 2014 sempat menyentuh rasio terendah sebesar 2,6kali. Sehingga tahun 2018 lalu terancam akan gulung tikar karena menanggung beban utang besar dengan rasio tinggi. Kondisi keuangan

yang memburuk dan beban utang besar menjadikan perusahaan-perusahaan Grup Lippo kesulitan secara likuiditas jangka pendek dan menengah. Dampak yang sedang dialami dari kasus Grup Lippo yaitu mengalami penurunan harga saham sebesar 60% (Tamara, 2018).

Kesulitan likuiditas yang dialami perusahaan dapat dicegah dengan pengendalian keuangan. Perusahaan membutuhkan *monitoring* kinerja dari manajemen perusahaan tersebut. menurut *Forum for Governance in Indonesia* (FCGI) mengemukakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Penerapan GCG yang dilakukan perusahaan dapat mengatasi dan mengurangi kebijakan manajemen yang merugikan perusahaan. Sehingga, tingkat hutang juga dapat dipengaruhi oleh penerapan *corporate governance* yang dilakukan perusahaan (Ashkhabi, 2015).

Pengukuran penerapan GCG oleh perusahaan dapat menggunakan beberapa indikator diantaranya *corporate governance index*, struktur kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit (Ashkhabi dan Agustina, 2015). Di negara Indonesia, *corporate governance index* perusahaan dapat diperoleh melalui data yang dilakukan oleh IICG (*The*

Indonesian Institute For Corporate Governance), IICD (*Indonesian Institute for Corporate Directorship*), serta survei oleh CLSA (*Credit Lyonnaise Securities Asia*) (Yenibra, 2015). Penelitian ini menggunakan data yang dikeluarkan oleh IICG karena di Indonesia menggunakan skor CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) sebagai ukuran dari kualitas *corporate governance* (Nugroho, 2014). CGPI adalah pemeringkatan penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia melalui riset yang dibuat untuk mendorong perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep *Corporate Governance* melalui perbaikan yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dengan melaksanakan evaluasi dan melakukan *benchmarking*. *Corporate governance index* yang tinggi pada perusahaan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* telah diterapkan dengan baik oleh perusahaan (Sari,dkk 2018).

Perusahaan yang mengikuti survei CGPI memberikan kesediaan untuk menjadi perusahaan yang terpercaya dan terbuka (Saputra dan Faizal, 2016). Penerapan *corporate governance* yang baik di dalam perusahaan dapat dinilai dari tingginya *corporate governance index* yang diperoleh perusahaan. Bagi kreditor *corporate governance index* dapat menjadi acuan dalam pengelolaan dana pinjaman yang telah diberikan oleh kreditor (Yenibra, 2015). Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan Ashkhabi dan Agustina (2015), Sari,dkk (2018), Erniawati dan Mawardi (2019), dan Hamid,dkk (2019) menyatakan

bahwa *Corporate Governance Index* berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. Namun penelitian yang dilakukan Saputra dan Faizal (2016) menyatakan bahwa *corporate governance index* berpengaruh positif terhadap biaya hutang.

Selain CGPI penerapan GCG dapat diukur melalui kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah keadaan dimana seorang pemegang saham yang mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan baik sebagai kreditor atau sebagai dewan komisaris, dengan adanya manajer dalam pengambilan keputusan dapat mengurangi atau mencegah konflik kepentingan yang terjadi diantara para pemegang saham dan manajer. Jika dilihat dengan menggunakan teori agensi (*agency theory*) maka dapat diketahui dengan adanya kepemilikan manajerial, setiap keputusan yang diambil dapat menguntungkan pihak pemegang saham dan pihak manajer, sehingga setiap keputusan yang dibuat dapat ditanggung dan dinikmati bersama. Manajer akan menekan terjadinya transaksi hutang untuk tetap menjaga proporsi kepemilikan di sebuah perusahaan, dengan menekan jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan membuat para kreditor melihat kinerja perusahaan tersebut lebih baik (Nugroho dan Meiranto, 2014). Pada penelitian yang dilakukan oleh Saputra dan Faizal (2016), Septian dan Panggabean (2016), Octafilia dan Sandika (2018) dan Wardani dan Rumahorto (2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap biaya hutang. Namun penelitian yang dilakukan Rahmawati (2015) dan

Mahmoudi dan Hashempour (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap biaya hutang.

Kepemilikan institusional yang merupakan perwujudan dari prinsip *Good Corporate Governance*. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses *monitoring* secara efektif sehingga dapat mengurangi manipulasi terhadap laba. Persentase saham yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang sesuai kepentingan manajemen (Kusuma, 2018). Pada penelitian yang dilakukan oleh Agustami dan Yunanda (2014), Ashkhabi dan Agustina (2015), Rahmawati (2015), Mahmoudi dan Hashempour (2016), Meiriasari (2017) dan Octafilia dan Sandika (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. Namun penelitian yang dilakukan oleh Samhudi (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap biaya hutang.

Indikator penyaluran *Good Corporate Governance* selanjutnya yaitu komite audit. Komite audit bertugas untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan sehingga kinerja manajemen sesuai dengan yang diinginkan oleh kreditor (*principal*). Komite audit yang efektif, akan menghasilkan internal perusahaan yang berkinerja efektif yang mengarah pada peningkatan reputasi perusahaan yang akan meningkatkan kepercayaan kreditor dan berpengaruh terhadap *cost of debt* yang rendah (Raharja dan Prasetyo, 2013). Pada

penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati (2014), Rahmawati (2015), dan Sari, dkk (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap biaya hutang. Namun penelitian yang dilakukan Adam, dkk (2015) dan Sutarti dan Pranaditya (2018) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap biaya hutang.

Berdasarkan penelitian terdahulu, masih terdapat hasil penelitian yang beragam mengenai biaya hutang, maka peneliti bermaksud untuk meneliti kembali mengenai pengaruh *Corporate Governance Index*, Struktur Kepemilikan Perusahaan dan Komite Audit terhadap Biaya Hutang. Penelitian ini mengacu dari penelitian Izanin (2019) yang meneliti tentang pengaruh *Corporate Governance Index* dan Struktur Kepemilikan Perusahaan terhadap Biaya Hutang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan. Penelitian ini menambah satu variabel yaitu Komite Audit.

Perbedaan dari penelitian terdahulu terletak pada keterbatasan data penelitian. Penelitian terdahulu meneliti pada tahun 2014-2017 sedangkan penelitian ini akan meneliti pada tahun 2014-2018. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan peserta *Corporate Governance Perception Index*.

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance Index*, Struktur Kepemilikan perusahaan dan Komite audit terhadap Biaya Hutang (Studi Empiris pada

4. Untuk membuktikan secara empiris bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap biaya hutang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik manfaat akademis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat bagi perusahaan dari penelitian ini adalah diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengembangan kepercayaan investor dan kreditor mengenai *good corporate governance* pada perusahaan di Indonesia.
2. Manfaat bagi peneliti dari penelitian ini adalah diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai *good corporate governance* pada perusahaan di Indonesia.